

“

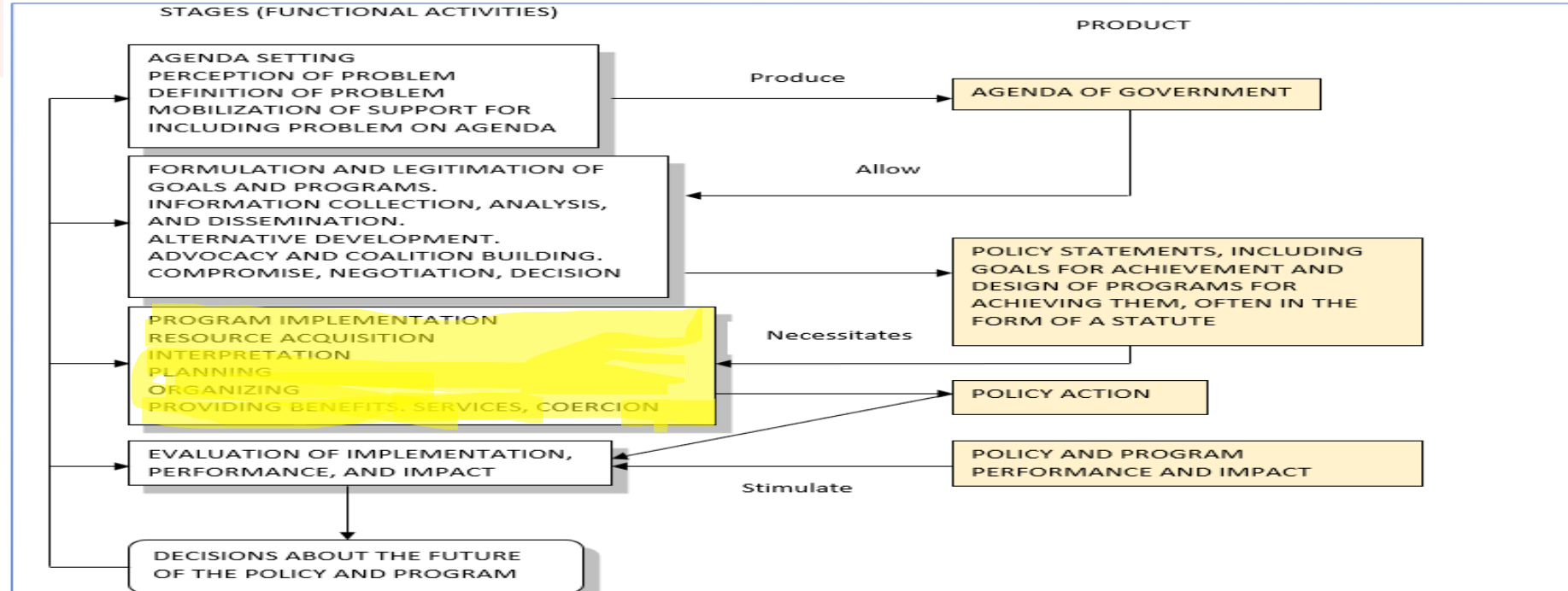
TEORI-TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Prof. DR. Novita Tresiana, M.Si

PERTEMUAN 9-10



TAHAPAN (Aktivitas Fungsional)



TEORI-TEORI IMPLEMENTASI

Van Meter dan
Van Horn (MH)-
1975

Model Hogwood
dan Gunn-1978

George Edward
(GE)-1980

Model Elmore,
dkk-1971-1979-
1981

Mazmanian dan
Sabatier (MS)-
1983

Grindle (GR)

Smith

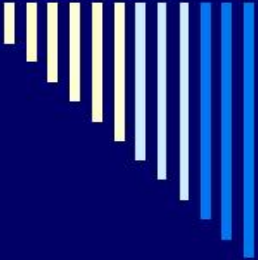
Model Goggin-
1990

Model
Nakamura dan
Smallwood

Walter Kickert,
Erik Hans Klijn,
dan Joop
Koppenjan-1997

Matland-1995





Agenda

- Teori Generasi I
- Teori Generasi II
- Teori Generasi III
- Kandidat Teori Generasi IV

PENELITIAN Generasi Pertama (1970–1975)

Implementasi sebagai sesuatu yang perlu dikaji secara benar dan bertanggungjawab

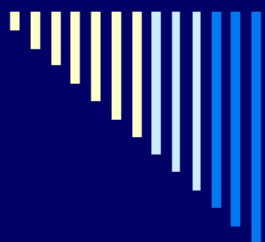
Memfokuskan pada :

- 1) Bagaimana suatu aturan diwujudkan sebagai hukum dan bagaimana suatu hukum dijadikan program
- 2) Upaya menunjukkan sifat kekomplekan dan dinamika implementasi
- 3) Menekankan pentingnya subsistem kebijakan dan sulitnya subsistem tersebut melakukan koordinasi dan pengawasan
- 4) Mengidentifikasi factor yang berhubungan dengan hasil suatu program
- 5) Mendiagnosis beberapa penyakit/ hambatan yang sering mengganggu pelaksana

Lebih menekankan pada **study kasus** (investigasi mendalam pd satu kebijakan tertentu pada satu lokasi tertentu, menggunakan metode deskriptif)

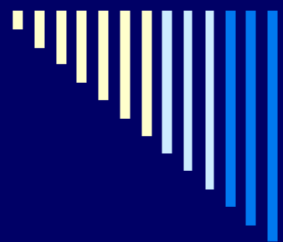
Kelemahan : preposisi yang dihasilkan hanya berlaku pd lokasi tertentu

Problema yang dihadapi : Menentukan konsep dan metodologi



Teori Generasi I

- ❑ Menerangkan bagaimana *outcomes* implementasi kebijakan publik pada suatu daerah tertentu dengan suatu kasus tertentu.
- ❑ Belum memperhatikan variabel apa yang mempengaruhi implementasi.
- ❑ Tokoh >> Eugene Bardach



Contoh

□ Kebijakan/Program Konversi minyak tanah ke gas elpiji

□ Kebijakan
sasaran
tujuan

Hasil
% masy.
yg melaku-
kan kon-
versi

Dampak
-Efisiensi
penge-
luaran
-Kebersi-
han

Penelitian generasi kedua (1975–1980): Building Models

Mendefinisikan fenomena implementasi sebagai kegagalan atau keberhasilan mencapai tujuan kebijakan

Memfokuskan pada :

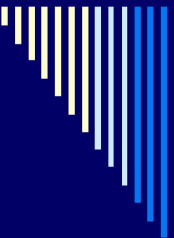
- 1) Jenis dan isi kebijakan**
- 2) Organisasi pelaksanaan dan sumber dayanya**
- 3) Pelaksana kebijakan : sikap, komitmen, motivasi, pola komunikasi dan sebagainya**
- 4) Yang dihasilkan lebih pada pengakuan bahwa implementasi bisa berubah setiap saat, identifikasi penentu keberhasilannya, persoalan yang muncul dsb.**

Hasil :

- Berbagai model dan pengujian keakuratan model tersebut**
- Masih banyak menggunakan pendekatan kualitatif**

Top down vs bottom up

	Top-down	Bottom-up
Fokus awal	Kebijakan pemerintah (pusat)	Jaringan implementasi pd dari level paling bawah
Identifikasi aktor utama	Dari pusat (atas) dilanjutkan ke bawah sbg konsekuensi implementasi	Dari bawah, yaitu para implementer pada level lokal ke atas
Kriteria evaluasi	Berfokus pada pencapaian tujuan formal yg dinyatakan dlm dokumen kebijakan	Kurang begitu jls, apa saja yang dianggap peneliti penting dan pny relevansi dgn kebijakan
Fokus secara keseluruhan	Bagaimana mekanisme implementasi bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan	Interaksi strategis antar berbagai aktor yang terlibat dlm implementasi



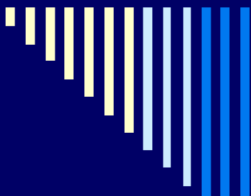
Teori Generasi II

- Menjelaskan bagaimana dengan menggunakan **kerangka teori**, yaitu **variabel** apa yang menyebabkan adanya **perbedaan** antara **output dengan objectives** dan antara **outcome dengan goals**.
- Telah ditelusuri **variabel2 apa** yg menyebabkan perbedaan antara *objectives* dgn *outputs* dan *goals* dengan *outcomes*.



Tokoh Teori Generasi II

- Edward C. III
- Mazmanian dan Sabatier
- Marlee S. Grindle



Contoh kebijakan Pos Yandu

- Variable yg mempengaruhi :
- 1. Organisasi : Org. ciptaan masy.
vs ciptaan pemerintah.

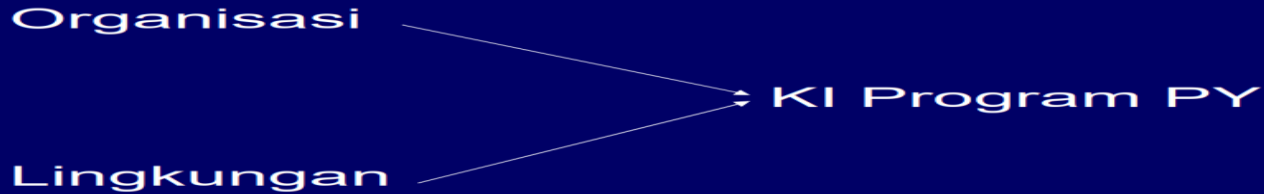
Kesimpulan : Org. ciptaan masy. lebih berhasil menjalankan pos yandu daripada org. ciptaan pemerintah.

- 2. Lingkungan : Pedesaan vs Perkotaan
- Kesimpulan : Lingk. dgn masy. yg satu lebih berhasil.

Kerangka Teorinya : KI Pos Yandu dipengaruhi oleh org. dan kondisi lingkungan



Diagram Hubungan

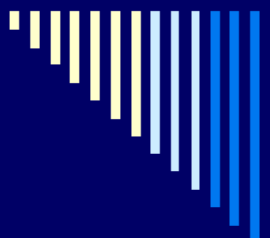


Hipotesis

□ H1 : Di daerah yg org. PY diciptakan LSM lebih berhasil daripada cip-taan pemerintah.

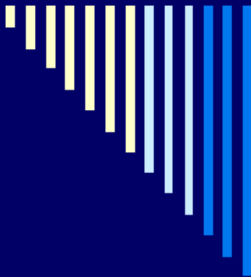
H2 : PY perkotaan kurang berhasil dari-pada pedesaan

Operasionalisasi hipotesis di atas dilakukan melalui penelitian studi perbandingan.



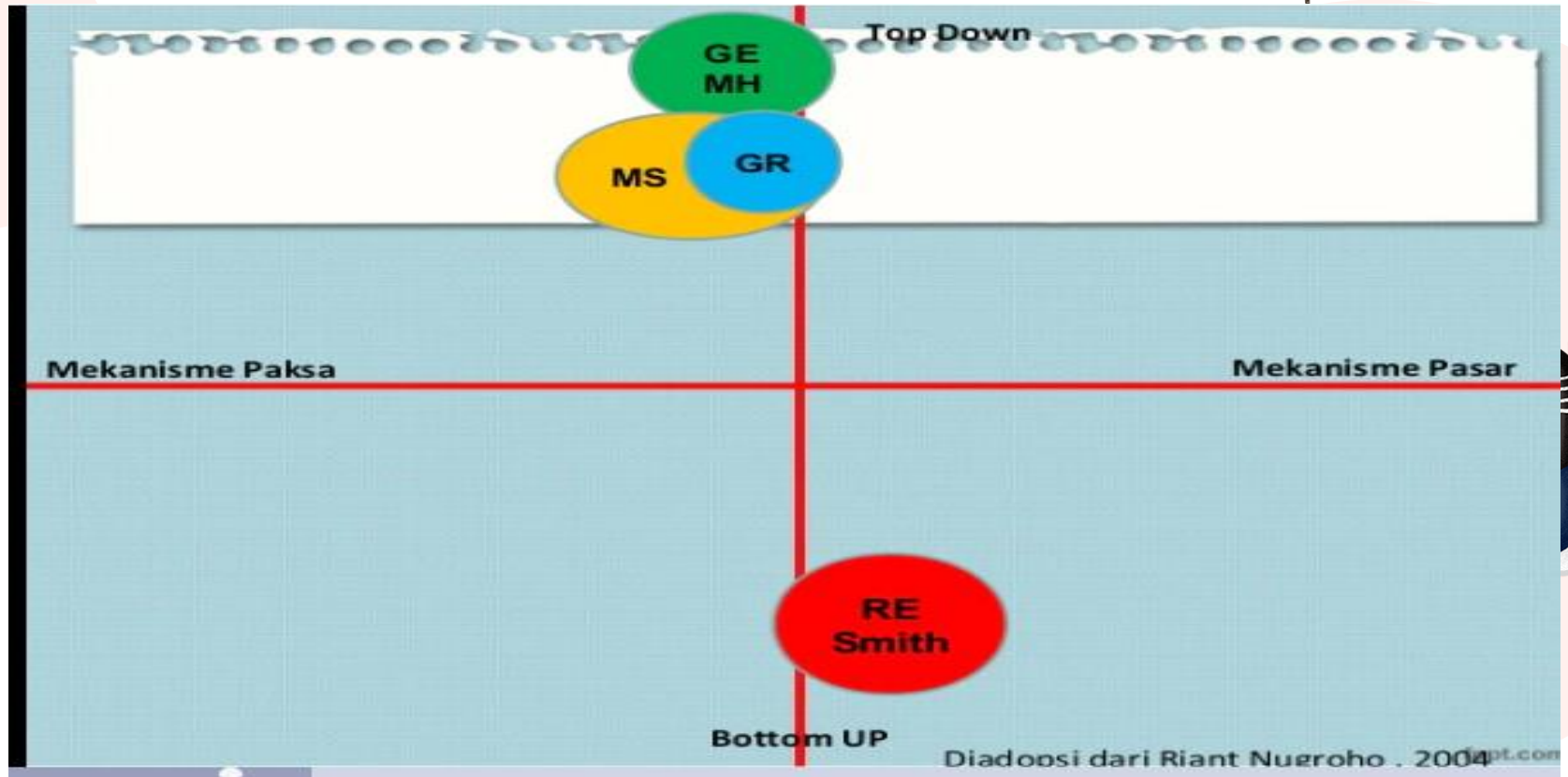
Metodologi

- ❑ Metode perbandingan/perbedaan yg digunakan adalah dengan menghitung rata2 (*method of difference*)
- ❑ Cara pembuktian :
minimal kita harus membandingkan kinerja implementasi pada 2 daerah yag sengaja dipilih, yaitu 1 desa yg maju sekali dan yg terbelakang.



Justifikasi

- Untuk melihat % kita harus memilih sekelompok PY yang diciptakan oleh masy. dan ciptaan pemerintah, kemudian diambil rata2 kinerja implementasi.



Model GEORGE Edwards III

Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III

Komunikasi

Sumberdaya

Disposisi

Struktur
Birokrasi

Implementasi



Model GE : Komunikasi



- Tiga hal penting : **Transmisi, Konsistensi, Kejelasan (Clarity)**
- Komunikasi harus akurat dan cermat agar tujuan dan sasaran kebijakan dipahami implementor .
- Aturan/petunjuk pelaksanaan harus jelas. tidak jelas → multitafsir → penyimpangan tujuan kebijakan/program
- Komunikasi penting untuk koordinasi dan sosialisasi ke kelompok sasaran.

Model GE : Sumber Daya



Meliputi : SDM, finansial, informasi, wewenang, fasilitas

- SDM : jumlah staff dan skills yang memadai.
- Finansial : jumlah dana /anggaran yang cukup
- Informasi : data dan fakta yang akurat
- Wewenang : otoritas utk memberi perintah, mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran , fasilitas, dan tenaga kerja ,dsb
- Fasilitas : gedung, peralatan, teknologi, dsb

Model GE : Disposisi/Kecenderungan



- Disposisi adalah watak dan karakteristik implementor : komitmen, kejujuran, ketaatan atau kepatuhan, dsb
- Komitmen dan kejujuran rendah → korupsi, mark up anggaran, dsb
- Implementor mempunyai sikap dan perspektif berbeda → implementasi tidak efektif. Misal : perbedaan persepsi tentang dampak kebijakan thd kepentingan dalam Perda antirokok, PKL, judi, dsb

Model GE : Struktur Birokra



- Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit (red tape) → melemahkan pengawasan shg implementasi tidak fleksibel → inefisiensi, korupsi, dsb
- Perlu adanya standard prosedur pelaksanaan atau SOP (Standard Operating Procedure) , petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program

Model Implementasi GRINDLE

Melaksanakan kegiatan dipengaruhi oleh :

a. **Isi Kebijakan :**

- Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan
- Tipe manfaat yg dihasilkan
- Derajat perubahan yg diinginkan
- Kedudukan pembuat kebijakan
- Pelaksana program
- Sumberdaya yang dilibatkan

b. **Konteks Implementasi :**

- Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat
- Karakteristik lembaga dan penguasa
- Kepatuhan dan daya tanggap

Hasil Kebijakan :

- Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok
- Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

Tujuan kebijakan

Tujuan yg ingin dicapai

Program aksi dan proyek individu yg didesain dan dibiayai

Apakah program yg dijalankan seperti yg direncanakan

Mengukur keberhasilan implementasi

MODEL DANIEL A. MAZMANIAN DAN PAUL A. SABATEIR

Mudah tidaknya masalah dikendalikan:

1. Dukungan teori dan teknologi
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran
3. Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki

Kemampuan kebijakan utk
menstrukturkan proses implementasi

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan
2. Dipergunakannya teori kausal
3. Kelengkapan alokasi sumber dana
4. Keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana
5. Aturan pelaksana dari lembaga pelaksana
6. Perekrutan pejabat pelaksana

Variabel di luar kebijakan yg memperngaruhi
proses implementasi

1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi
2. Dukungan publik
3. Sikap dan risorsis dari konstituen
4. Dukungan pejabat yg lebih tinggi
5. Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana

TAHAPAN DALAM PROSES IMPLEMENTASI

OUTPUT
kebijakan dari
lembaga
pelaksana

Kepatuhan target
utk mematuhi
output kebijakan

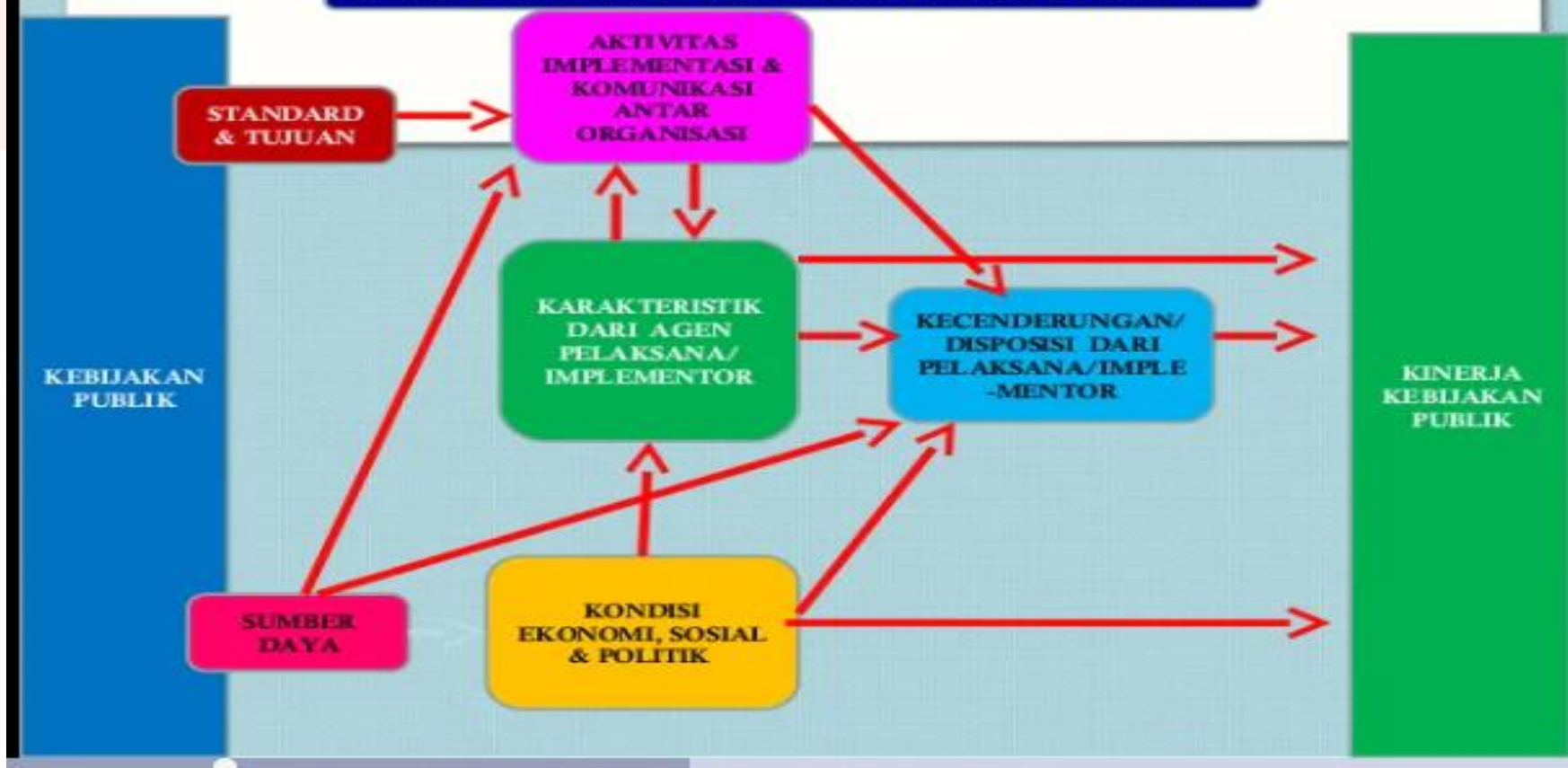
Hasil nyata output
kebijakan

Diterimanya
hasil tersebut

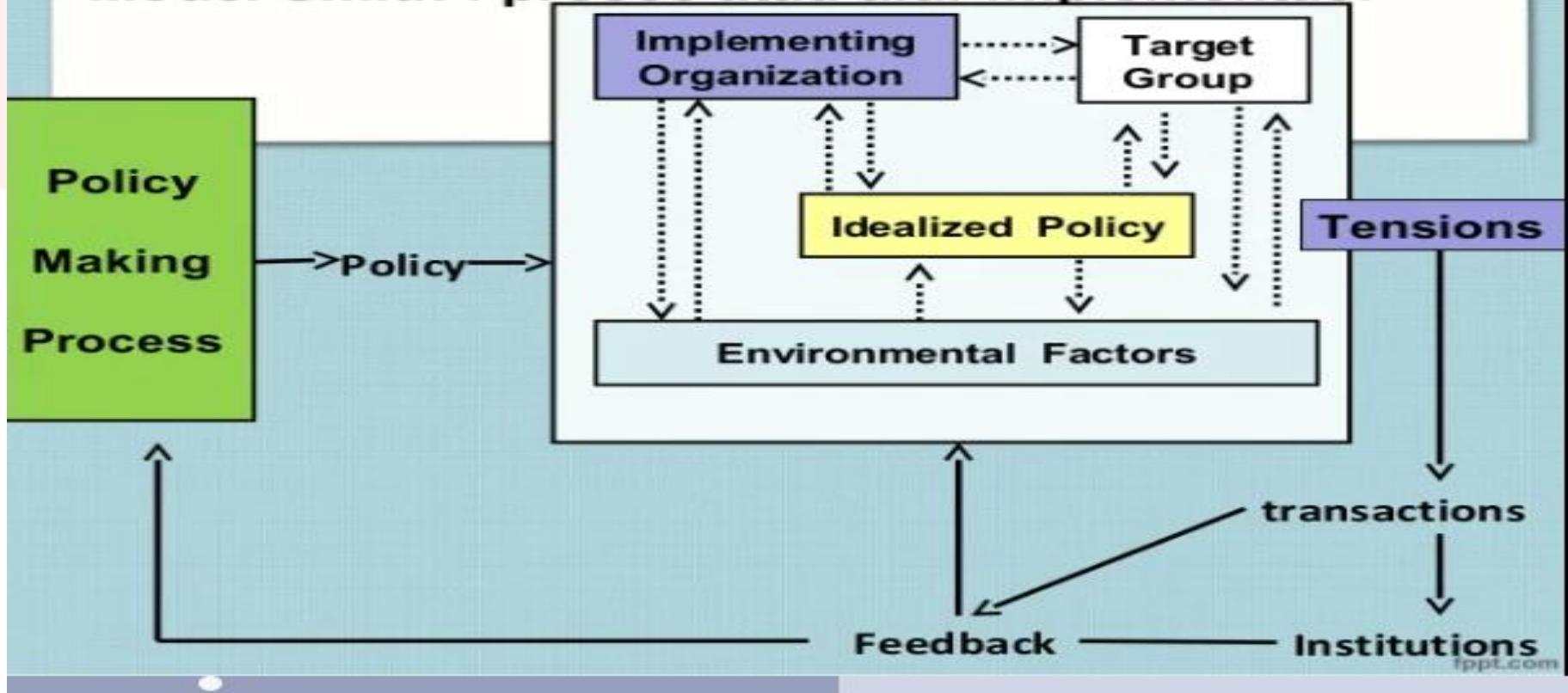
REVISI
UNDANG-
UNDANG



MODEL DONALD VAN METER DAN CAREL VAN HORN

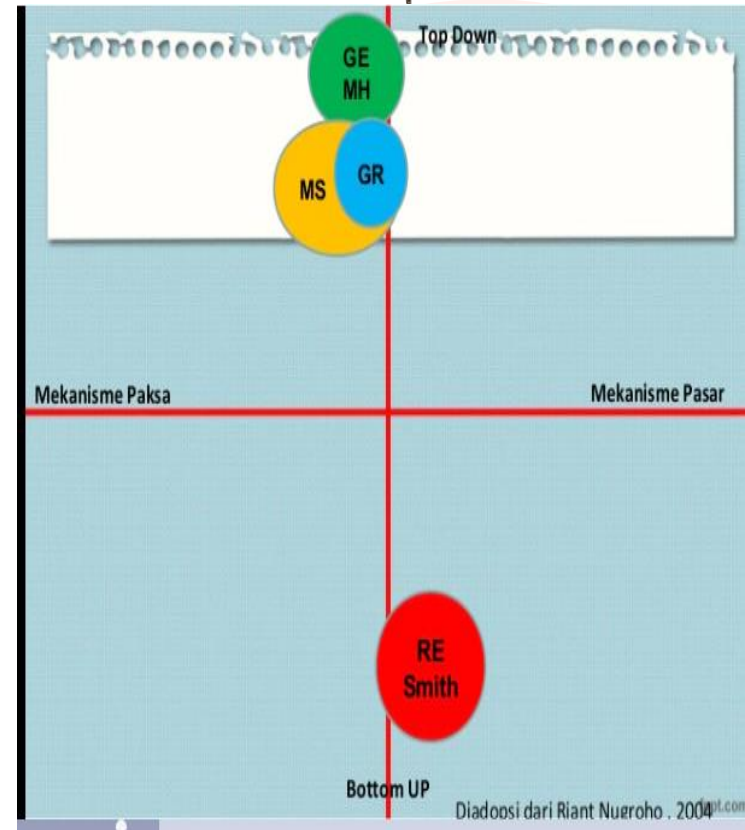


Model Smith : proses atau alur implementasi



TENTUKAN DAN SUSUN TEORI GENERASI 2

Susun semua model-model pada generasi ke-2 dalam diagram top-down dan paksa-pasar



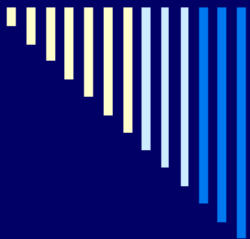
Penelitian generasi ketiga(1980-?) : more scientific approach

Implementasi merupakan proses yang dinamis yang terus berjalan selama berlangsungnya suatu kebijakan

Memfokuskan pada :

- 1. Komunikasi antara lembaga pemerintahan**
- 2. Penysusunan desain penelitian**
- 3. Mengakaji variable variable predictor dalam implementasi**
- 4. Studi implementasi lebih diarahkan pada hal yang bersifat scientific**
- 5. Banyak menggunakan pendekatan kauntitatif**

Sampai sekarang masih terjadi pembaharuan dalam studi implementasi termasuk upayanya mengikuti dinamika global dan perubahan public issues



Teori Generasi III

- Lebih maju dibandingkan dengan 2 teori sebelumnya.
- Teori Generasi III mencoba menghubungkan *Independent Variable* dengan *Dependent Variable*.
- Dijelaskan pula bagaimana proses hubungan itu terjadi.



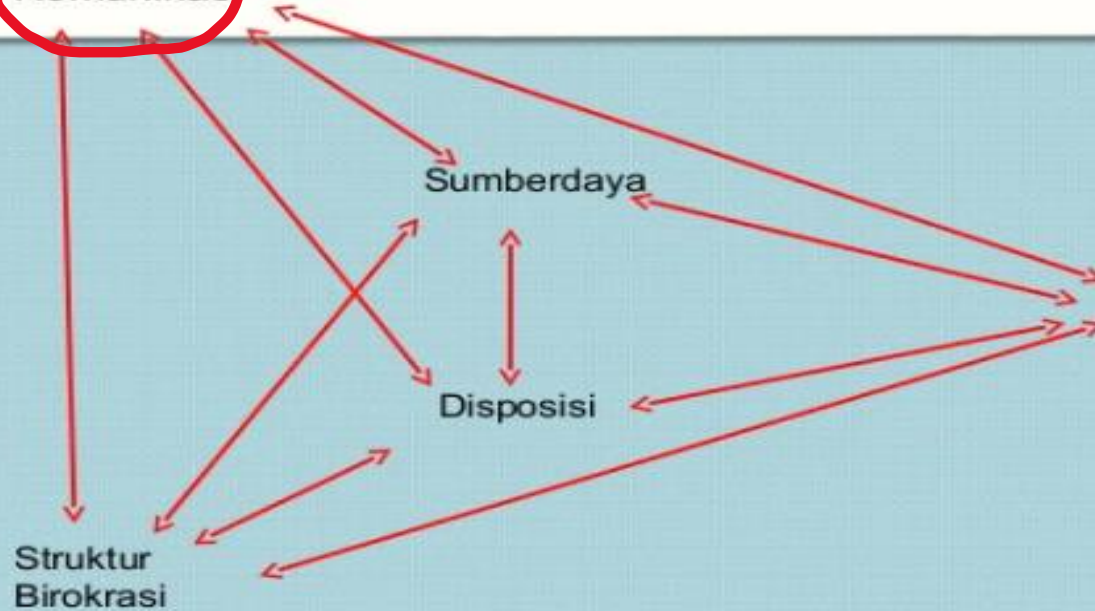
Perbedaan dengan TG II

- ❑ Pada TG II, dalam kasus Pos Yandu, kita hanya dapat mengatakan bahwa, "baik buruknya KI ditentukan oleh organisasi dan lingkungan."
- ❑ Kita tidak dapat mengatakan/menjelaskan bagaimana organisasi dan lingkungan dapat mempengaruhi KI.
- ❑ Pengaruh itu hanya dapat dijelaskan pada TG III.

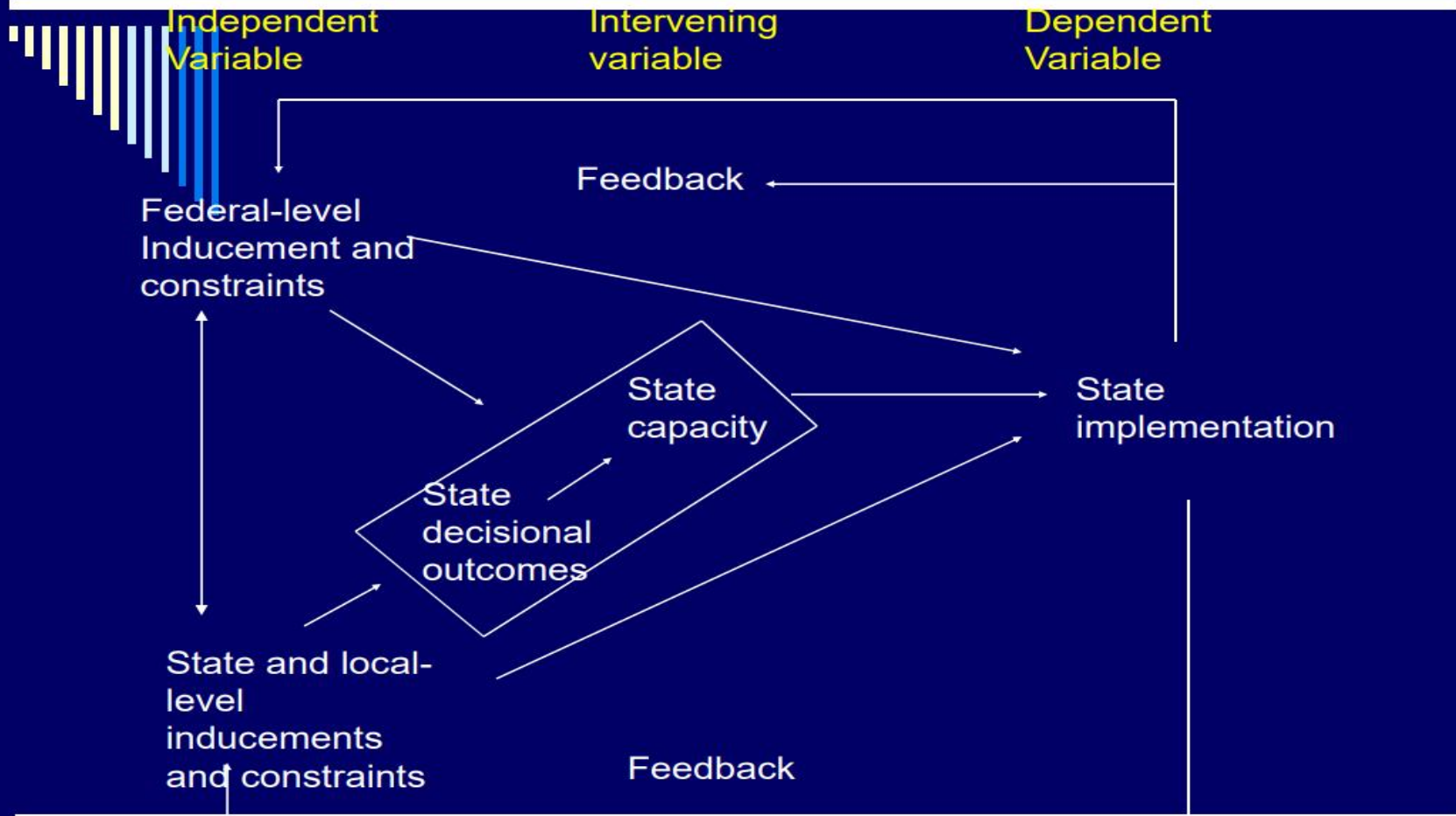
Model GEORGE Edwards III

Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III

Komunikas



Implementasi



PERDEBATAN-PERDEBATAN SEBELUM MEMASUKI GENERASI 4



Gugatan thd keberlangsungan studi implementasi

- Selama ini studi implementasi sulit berkembang karena hanya berkuat pada model yang ada. Sulit untuk membangun grand theory tentang implementasi
- Misal : Sabatier & Jenkins(1992) dia menganjurkan melakukan study yg disebut “**Policy charge and learning**” yg focus pd “**bagaimana merespon kebijakan yg gagal diimplementasikan dan bagaimana implementor belajar dari kegagalan tersebut**”.
- Ingram (1991): studi implementasi “ **karena selama ini para ahli cenderung punya definisi dan pemahaman yg berbeda beda ttg yg dimaksud implementasi**”
- P De Leon (1999) : **studi implementasi mencapai titik “intellectual dead-end” atau menyebutnya “lacking in any consensual theory” krn sulinya mengembangkan ide untuk mengembnagkan studi implementasi**

Dampak dari kondisi tersebut, terjadi pengelompokan posisi peneliti implementasi

1. REFORMER (penganut pembaharuan) memiliki sikap positif terhadap kelanjutan studi implementasi. **Tokoh : Richard Matland dengan konsepnya “ ambiguity and conflict”**
2. TESTER, kelompok yang nyaman dengan perkembangan studi implementasi saat ini. Kelompok ini hanya tertarik untuk menguji teori yang sdh ada, tapi tidak memebri anjuran perbaruan konsep dan metodologinya
3. SKEPTIK, kelompok yg berpikiran negative . Menurut kelompok ini studi implementasi tdk pelru dilanjutkan kecuali ada perubahan yg signifikan (Mis : Peter D leon, Helen Ingram dsb)
4. TERMINATOR : berfikiran negatif terhadap studi implementasi. Tak perlu dilanjutkan dan tak perlu dicari terobosan dalam bidang konsep dan metodologi karena studi ini pd dasarnya sdh mandeg

Faktor Yang mempengaruhi perkembangan studi implementasi

1. Perkembangan paradigma ilmu administrasi

Publik, karena :

- ❖ Studi implementasi tak bisa lepas dari ilmu administrasi public
- ❖ Perkembangan paradigma tersebut akan mempengaruhi asumsi yang berkaitan dengan cara mendefinisikan masalah, peran public, peran pemerintah, yang mana tentu akan berdampak pada bagaimana kita menjelaskan keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan

2. Kemunculan era demokratisasi dan konsep governance

- ❖ memberi ruang partisipasi pada masyarakat
- ❖ Mengurangi peran Negara dalam policy process
- ❖ Pelibatan berbagai stakeholder dalam policy process namun hal ini bisa berdampak dua hal :

A. semakin terbukanya peluang keberhasilan implementasi mengingat proses perumusannya yang melibatkan banyak stakeholder

B. Banyaknya stakeholder yang terlibat justru bisa mengancam proses implementasi , mengingat sulitnya koordinasi dan pengawasan yang bisa dilakukan

3. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

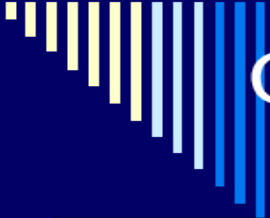
Kandidat Teori Generasi IV

Regim theory. Teori ini dikembangkan oleh Robert Stoker. Untuk menjelaskan fenomena implementasi menurut teori ini mereka yang terlibat dalam implementasi harus dipahami sebagai aktor2 yang memiliki nilai2 yang ingin diwujudkan dalam proses implementasi dan mereka ini menciptakan kerangka kerja organisasi yang mendukung pencapaian nilai2 tersebut. Dengan demikian kerjasama tidak akan dapat terwujud jika ada konflik diantara para aktor tentang tujuan kebijakan. Pilihan yang mungkin dilakukan adalah dengan menekan konflik atau melepaskan kontrol terhadap kebijakan untuk dapat melakukan kerjasama. Dengan demikian regime pelaksana implementasi harus diatur agar implementasi dapat berjalan dengan baik.



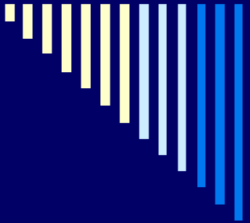
Teori-lanjut

- **Teori Kontingensi.** Teori ini dikembangkan oleh James Lester yang mengatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dua faktor 1). **Komitmen** dan 2) **kapasitas pemerintah** (daerah). Berdasarkan dua faktor tersebut pemda dapat dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan tingkat keberhasilan implementasi yang dilaksanakannya.



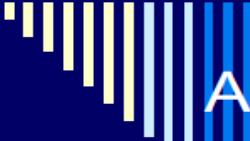
Contingency Theory

Kapasitas Pemerintah Daerah		
Komitmen Pemerintah Daerah	Tinggi	Rendah
Tinggi	Progresive	Struggler
Rendah	Delayer	Regressive



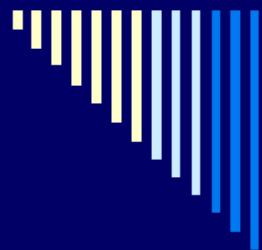
Teori-lanjut

- *Ambiguity conflict model*. Teori ini dikembangkan oleh Richard Matland didasarkan pada ambiguitas dan konflik yang muncul dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan pada dua variabel pokok tersebut menurutnya tipologi implementasi dapat dibedakan menjadi empat jenis.



Ambiguity and Conflict Theory

Ambiguity	Conflict	
	Low	High
Low	Administrative implementation	Political Implementation
High	Experimental Implementation	Symbolic Implementation



Teori-lanjut

- *Trust and involvement theory*. Teori ini dikembangkan oleh Denise Scheberle yang mengatakan bahwa keberhasilan implementasi akan sangat dipengaruhi oleh **tingkat kepercayaan** dan **keterlibatan para aktor** dalam implementasi



Trust and Involvement Theory

		Involvement	
Trust		High	Low
High		Pulling together	Cooperative but autonomous
Low		Coming apart and contentious	Coming apart and avoidance

LATIHAN/TUGAS

1. PERHATIAN DATA-DATA/INFORMASI
2. ANALISIS MENGGUNAKAN SALAH SATU TEORI
3. APA YANG TERGAMBAR DARI HASIL ANALISIS



DATA-DATA: KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS



3 DOSA BESAR & HUBUNGAN DENGAN KARAKTER MAHASISWA

Kemendikbud minta kampus hapus tiga "dosa besar" pendidikan tinggi

© Jurnal, 4 Desember 2020 17:32 WIB



Hari Perempuan Internasional, Mendikbud Ingatkan 3 Dosa Besar dalam Dunia Pendidikan

Neneng Zubaidah

Seririn, 03 Maret 2021 - 18:04 WIB

3 DOSA BESAR KAMPUS/PT

1. RADIKALISME/EXTRIMISME

2. MIRAS/NARKOBA

3. KEKERASAN SEKSUAL & BULLYING

a. pelecehan seksual, b. eksploitasi seksual, c. pemaksaan kontrasepsi, d. pemaksaan aborsi, e. perkosaan, f. pemaksaan perkawinan, g. pemaksaan pelacuran, h. perbudakan seksual, dan i. penyiksaan seksual,

Bullying: Tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya (Sejiwa, 2008)



PENDIDIKAN KARAKTER

- ✓ **KAMPUS/PT** perlu memberikan **pendidikan** untuk pembangunan **karakter** mahasiswa
- ✓ **KARAKTER** yang baik akan mendorong, dan memudahkan seseorang untuk *mengembangkan kebiasaan baik*. Kebiasaan itu tumbuh dan berkembang dengan didasari oleh *kesadaran, keyakinan, kepekaan, dan sikap*.
- ✓ **PENDIDIKAN KARAKTER** memiliki **esensi** dan makna yang sama dengan **pendidikan** moral dan **pendidikan** akhlak yang bertujuan untuk membentuk pribadi mahasiswa, supaya menjadi *manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik*.

REALITAS/KASUS DOSA KE-3 DI PT

Fakta-fakta Kasus Pemerkosaan Mahasiswa UGM, Kronologi hingga Petisi Online

Rabu, 7 November 2018 19:54 WIB



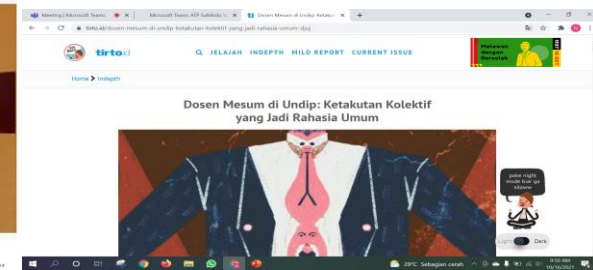
lihat foto



Viral, Video Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Di-b...
lampung.tribunnews.com



LBH Yogya Terima 30 Aduan Kasus Dugaan Kera...



Mahasiswa Banyak Jadi Korban Kekerasan Seksual, LBH Bali Sebut Pelaku Dilindungi Kampus

Dwi Bowo Raharjo | Ria Rizki Nirmala Sari

Senin, 02 Agustus 2021 | 15:43 WIB



Ini 9 Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi 'UGM Darurat Kekerasan Seksual'

Usman Hadi - detikNews

Kamis, 08 Nov 2018 12:30 WIB

15 komentar

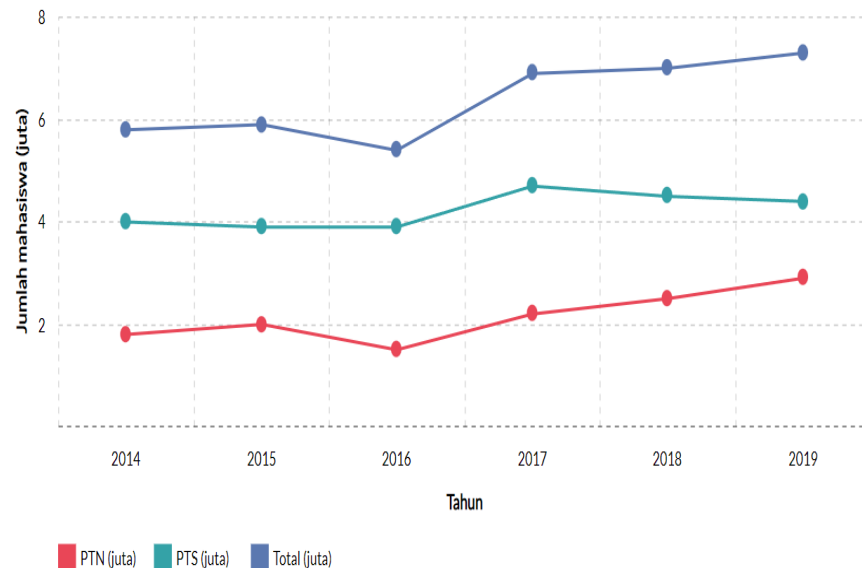
SHARE



JUMLAH MAHASISWA DI PT DI INDONESIA (Tahun 2019)

Institusi Perguruan Tinggi	Jumlah Institusi	Jumlah Mahasiswa
Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	123	2.680.224
Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN)	84	487.625
Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	3.115	4.589.013
Perguruan Tinggi Agama Swasta (PTAS)	1.055	262.061
Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK)	173	165.135
TOTAL	4.550	8.184.058

Jumlah mahasiswa di Indonesia, 2014-2019



HASIL PENELITIAN

1. **Ardi dan Muis (2014)** pada **Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2014**. Mereka menemukan bahwa **40 persen dari 304 mahasiswi** pernah mengalami kekerasan seksual.
2. **Survei Jaringan Muda Setara (2019)**, sebuah organisasi akar rumput beranggotakan mahasiswi pemerhati isu kekerasan seksual dari berbagai kota di Indonesia, menunjukkan **bahwa 54 dari 70 mahasiswi di Samarinda pernah mengalami kekerasan seksual**.
3. **Investigasi dan laporan berita (2019)** yang dihasilkan oleh konsorsium #NamaBaikKampus yang terdiri dari beberapa wartawan dari Tirto, Vice, dan The Jakarta Post, 179 anggota sivitas akademika dari **79 perguruan tinggi yang tersebar di 29 kota di Indonesia** pernah mengalami kekerasan seksual.
4. **Amerika Serikat**, satu dari empat mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual dalam berbagai wujud (Wies 2015). **Inggris**, sekitar 56% mahasiswa menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di kampusnya (Wies 2015).
5. **Sejumlah kecil (19.74%)** responden yang menyatakan bahwa di perguruan tingginya terdapat kebijakan/ aturan/ prosedur tetap untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. **Sebagian besar (80.26%)** responden menyatakan perguruan tingginya tidak memiliki kebijakan/aturan/prosedur tetap untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang



Gambar 1. Komposisi korban kekerasan seksual di PT berdasarkan gendernya serta pelaku kekerasan seksual berdasarkan profil atau jabatan fungsionalnya menurut survei yang dilakukan oleh konsorsium #NamaBaikKampus (2019)



MENUNJUKKAN APA?

- ❖ Mayoritas **korban** atau **penyintas** kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Indonesia merupakan **perempuan**
- ❖ Sebagian besar **pelaku** kekerasan seksual merupakan **mahasiswa dan diikuti dosen**
- ❖ Beberapa kasus melibatkan **mahasiswa dan dosen** sebagai **pelaku**
- ❖ Ada setidaknya “**tiga kemungkinan**” yang terjadi:
 - 1) korban mengalami kekerasan seksual berulang;
 - 2) korban mengalami satu kali kekerasan seksual yang pelakunya lebih dari satu orang (mahasiswa dan dosen);
 - 3) kedua hal tersebut terjadi.



Gambar 2. Jumlah kasus kekerasan seksual yang tertangkap oleh lembaga pers mahasiswa dan perusahaan-perusahaan media sepanjang tahun 2020



BAGAIMANA TINDAKAN PT?

- ❖ Mencabut gelar sarjana atau sejumlah prestasi yang dimiliki pelaku **(Titik A dan D)**;
- ❖ Memecat atau memberlakukan skors panjang pada pelaku/dosen **(Titik B dan E)**; atau
- ❖ Mengupayakan keadilan bagi korban melalui proses penyelidikan internal **(Titik C, F, G, dan H)**.



SURVEI-SURVEI KERENTANAN SELAMA PJJ (KHUSUS PELECEHAN SEKSUAL)

PELECEHAN SEKSUAL.

- ❖ Pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan tetapi juga ada ***pelecehan gender***.
- ❖ Pernyataan atau perilaku seksis yang menghina atau merendahkan seseorang juga bisa dianggap sebagai pelecehan seksual.
- ❖ Pelecehan seksual adalah saat seseorang menjadikan orang lain baik secara fisik maupun verbal sebagai obyek.



HASIL SURVEI MENGGAMBARKAN APA?

PLATFORM ATAU TEMPAT DARING: di mana pelecehan seksual paling sering terjadi dalam konteks WFH, merupakan platform yang digunakan juga oleh segenap sivitas akademika perguruan tinggi Indonesia.

- ❖ Tempat-tempat tersebut antara lain di:
 - a. aplikasi pengganti SMS seperti Whatsapp, Line, dan Telegram (90%);
 - b. aplikasi konferensi video seperti Zoom, GoogleMeet, dan Skype (75%);
 - c. surat elektronik atau e-mail (61%);
 - d. telepon (32%); dan e. media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan blog (22%).

KORBAN: Laki-Laki dan Perempuan



LANJUTAN

MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL: 78% dari 403 responden survei tersebut mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di lebih dari 2 platform di atas sekaligus, semasa 1 bulan menjalankan WFH.

REAKSI KORBAN : minimnya pengetahuan dan kesadaran, kampus yang belum memiliki peraturan jelas dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, sebagian besar korban setelah mengalami pelecehan seksual daring hanya diam saja atau tidak melaporkan kasusnya ke atasan atau pihak berwenang.



TABEL 1
Penggolongan bentuk pelecehan seksual daring dan gender korban
(P=perempuan; L=laki-laki) menurut hasil survei SAFEnet dan Never Okay
Project (2020)

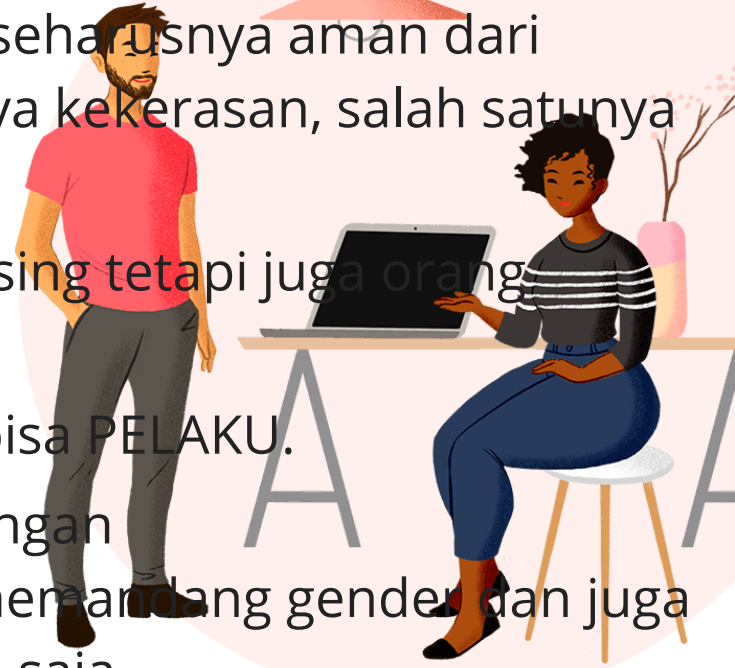
No.	Bentuk Pelecehan Seksual Daring	Korban	
		P (%)	L (%)
1	Mendapat candaan atau lelucon seksual	62%	47%
2	Dikirimkan foto, video, e-mail, pesan/stiker seksual	34%	58%
3	Komentar, hinaan, atau kritikan negatif terhadap bentuk fisik tubuh	29%	11%
4	Mendapat rayuan seksual	25%	11%
5	Digosipi tentang perilaku seksual tidak berkaitan dengan pekerjaan	20%	0%
6	Diperlakukan oleh rekan kerja sebagai alat pemuas hasrat seksual	15%	5%
7	Difoto atau direkam diam-diam saat bekerja daring	14%	37%
8	Diintimidasi/diancam agar terlibat dalam aktivitas seksual	9%	5%
9	Disebarnya foto/video diri dengan nuansa seksual	9%	5%

Tabel 2.
Penggolongan bentuk reaksi korban setelah mengalami pelecehan seksual daring dan gender korban menurut hasil survei SAFEnet dan Never Okay Project (2020)

No.	Reaksi Korban Pelecehan Seksual Daring	Korban	
		P (%)	L (%)
1	Diam karena tidak tahu harus berbuat apa	55%	79%
2	Berbicara ke pelaku bahwa ia tidak nyaman dan hal tersebut salah	40%	16%
3	Lapor ke teman/keluarga di luar kantor	23%	0%
4	Lapor ke rekan kerja sekantor	15%	5%
5	Mendokumentasikan kejadian	11%	5%
6	Melapor ke HRD	6%	5%
7	Melapor ke lembaga negara	0%	0%

APA YANG TERGAMBAR

- ❖ BANYAK TEMPAT-TEMPAT yang dianggap seharusnya aman dari kekerasan justru menjadi tempat terjadinya kekerasan, salah satunya universitas, PROSES PEMBELAJARAN
- ❖ PELAKU kekerasan seksual bukan orang asing tetapi juga orang terdekat
- ❖ LAKI-LAKI bisa jadi KORBAN, perempuan bisa PELAKU.
- ❖ Kekerasan seksual juga terjadi pada hubungan homoseksual. "Kekerasan seksual tidak memandang gender dan juga tidak hanya terjadi pada hubungan hetero saja





IMENGAPA REALITAS/KASUS TERJADI DI KAMPUS?





**1. RELASI KUASA
(PELAKU-KORBAN)
DALAM BUDAYA
PATRIARTKI**

**2. PELUANG
(OPPORTUNITY)**

AKAR PENYEBAB

**4. PAYUNG
HUKUM
NASIONAL**

**3. PERATURAN,
MEKANISME, UNIT
KHUSUS, KONTROL
SOSIAL PT
(SANKSI TEGAS)**

AKAR PENYEBAB

1. Adanya RELASI KUASA(pelaku-korban) dengan budaya patriarki (kekerasan seksual bukan dipandang masalah agresivitas seksual melainkan dipandang sebagai ekspresi dari hubungan kekuasaan atau dominasi)
2. Adanya PELUANG (opportunity); membatasi interaksi tanpa kontrol sosial
3. KETIADAAN ATURAN, MEKANISME, REAKSI/RESPON (KONTROL SOSIAL), baik berupa prosedur penanganan, pemulihan korban, sanksi bagi pelaku, organ/unit/lembaga dengan sumber daya yang terlatih (welltrained) agar korban mendapat penanganan yang memadai dan tidak mengalami perlakuan yang dapat semakin merugikan (misalnya merasa tidak dipercaya atau diragukan keterangannya, merasa dipermalukan, merasa dipersalahkan, atau diminta untuk berkompromi demi menjaga nama baik institusi atau pelaku).
4. KETIADAAN PAYUNG HUKUM NASIONAL di Lingkungan Kampus (RUU PKS, PERMEN PKS)



FENOMENA GUNUNG ES: MENGAPA KORBAN DIKAMPUS TIDAK MELAPOR?

PERTAMA: Tidak adanya laporan kejadian, disebabkan oleh **keengganan** korban untuk melapor, **PENYEBAB:**

1. Korban kekerasan seksual merasa **malu** atas perlakuan yang menimpa dirinya.
2. Ketiadaan **aturan/mekanisme yang handal**, sehingga korban tidak tahu secara pasti apa yang harus dilakukan, kemana ia harus lapor, dan prosedur apa saja yang harus ditempuh.
3. **ketidakpercayaan korban** pada sistem (bahwa sistem yang ada akan mampu menyelesaikan permasalahannya atau memberikan penanganan yang memadai).



KEDUA: korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya adalah korban *tidak menyadari bahwa ia sebenarnya adalah korban* kekerasan seksual atau korban menganggap hal tersebut bukan hal yang serius (trivial) sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

KETIGA: korban *takut atau khawatir akan resiko atau konsekuensi* dari pelaporan yang dilakukan atau terungkapnya kasus (komunitas)



PERAN & FUNGSI PERGURUAN TINGGI (MEMBANGUN BUDAYA AKADEMIK)





Salamat

bekka bér

Gamsahabnida

Xìolch yn fawr

Gratias Ago Vos

Khokhobchai Than

Xièxiè Nín

Terima Kasih
Dank U
Dankon

Dankie dat U Sas efcharistó

Danke

Thank You

Merci

Dhan'yavāda

Arigato

Ngiyabonga

Sağ Olun

Gràcies

Teşekkürler

Grazie

Tack

Obrigado

Hvala

Köszönöm

Asante

Dziękuję

Spasibo

Va Multumesc

Go raibh maith agat

Gracias